

**ANALISIS SIKAP SISWA KELAS XII SMAS ISLAM ATHIRAH MAKASSAR TERHADAP
ISU-ISU KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL**

ALIFKA DALILAH

0084971591



SMAS ISLAM ATHIRAH

2025

**ANALISIS SIKAP SISWA KELAS XII SMAS ISLAM ATHIRAH MAKASSAR TERHADAP
ISU-ISU KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**ALIFKA DALILAH
(0084971591)**



**SMAS ISLAM ATHIRAH
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Sikap Siswa Kelas XII SMAS Islam Athirah Makassar terhadap Isu-isu Kebijakan Pendidikan Nasional
Nama Siswa : Alifka Dalilah
NIS : 23240027

Menyetujui

Koordinator KIR

Guru Pembimbing

Sabrianti A., M.Pd
NIK. 2015 01 011

Yusminiwati, S.Pd., M.Pd.,
NIK. 2003 01 013

Mengetahui:

Kepala SMA Islam Athirah 1 Makassar

Tawakkal Kahar, S.Pd., M.Pd.
NIK. 2002 01 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penyusunan KIR dengan judul **“Analisis Sikap Siswa Kelas XII SMA Islam Athirah Makassar terhadap Isu-isu Kebijakan Pendidikan Nasional”**. dapat diselesaikan dengan baik.

Berbagai rintangan dan hambatan penulis hadapi selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini. Namun, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya KIR ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yusminiwati, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan sumbangan ide dalam penyusunan KIR ini.

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada kepala SMA Islam Athirah Makassar yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, baik pada saat pembelajaran, maupun pada saat pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan. Mudah-mudahan bantuan dan bimbingan yang diberikan mendapat pahala dari Allah Swt.

Terwujudnya KIR ini juga atas dorongan dan doa restu keluarga dan teman-teman. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Amiruddin, Ibunda Marlina.

Rasa terima kasih penulis sampaikan pula kepada guru-guru di SMA Islam Athirah 1 Makassar pada umumnya karena telah memberi dukungan pada penulis dalam mengikuti proses pembelajaran.

Akhirnya, penulis berharap semoga bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Makassar, 11 November 2025

Alifka Dalilah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Rumusan Masalah:	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Sejenis.....	5
2.2 Definisi Sikap	6
2.3 Kebijakan Pendidikan Nasional.....	7
2.4 Siswa Sekolah Menengah Atas	9
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1 Jenis Penelitian	10
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	10
3.3 Populasi dan Sampel	10
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	11
3.5 Teknik Analisis Data.....	11
3.6 Instrumen Penelitian	11
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	12
4.1 Hasil Penelitian	12
4.2 Pembahasan	16
BAB V PENUTUP	19
5.1 Kesimpulan	19
5.2 Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	13
Tabel 4.2	14
Tabel 4.3	15
Tabel 4.4	16
Tabel 4.5	16
Tabel 4.6	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pendidikan nasional berperan sangat penting dalam mengelola dan mengatur prosedur pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini meliputi serangkaian pedoman, aturan, prinsip yang ditentukan oleh pemerintah untuk mencapai standar tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah demi mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta pengembangan karakter siswa. Dengan dibentuknya kebijakan pendidikan nasional pemerintah berharap setiap individu bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang relevan dan berkualitas dengan kebutuhan negara agar bisa terus berkembang.

Pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi sebagai upaya untuk pembentukan watak dan pengembangan kemampuan serta pembudayaan peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kebijakan pendidikan nasional telah melewati banyak perubahan yang signifikan, pada awal kemerdekaan, yang menjadi fokus utama adalah pembasmian buta huruf dan pengembangan akses pendidikan dasar. Lalu memasuki orde baru, mulai diwajibkan belajar 6 tahun, pada tahun 1994 dilanjutkan menjadi program wajib belajar 9 tahun. Pasca reformasi, terjadi desentralisasi pendidikan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan terkini yang masih relevan menjelang 2025 meliputi implementasi Kurikulum 2013 yang menekankan pendekatan ilmiah dan pengembangan karakter. Program Merdeka Belajar yang dicanangkan pada 2019 menjadi landasan reformasi pendidikan, fokus pada fleksibilitas kurikulum dan pengembangan kreativitas siswa.

Meskipun kebijakan pendidikan nasional seperti Kurikulum Merdeka dan Asesmen Nasional dirancang untuk meningkatkan kualitas dan fleksibilitas pembelajaran, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan kajian Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024), hanya sekitar 34% satuan pendidikan yang tergolong “baik” dan “sangat baik” dalam penerapan kebijakan tersebut, sedangkan 66% lainnya masih berada pada kategori “kurang” atau “sangat kurang”. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan implementasi kebijakan pendidikan belum merata di berbagai sekolah.

Selain itu, survei nasional oleh *GoodStats* (2025) juga mencatat bahwa 42% responden masyarakat menilai kebijakan pendidikan nasional masih dipengaruhi oleh kepentingan politik, bukan semata berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Situasi ini menunjukkan bahwa siswa sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh dinamika perubahan kebijakan pendidikan yang terus berganti.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana siswa sebagai penerima manfaat utama dari sistem pendidikan menyikapi berbagai kebijakan tersebut. Sikap mereka dapat menjadi indikator sejauh mana kebijakan pendidikan nasional benar-benar dipahami, diterima, dan dirasakan dampaknya di lingkungan sekolah.

Keterlibatan siswa dalam proses pembentukan dan penerapan kebijakan pendidikan merupakan aspek fundamental sering terabaikan. Siswa sebagai penerima manfaat utama dari sistem pendidikan, perspektif dan pendapat siswa seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan dan penetapan keputusan kebijakan. Menurut Wibowo (2019), keterlibatan siswa terhadap isu-isu pendidikan yang memengaruhi mereka secara langsung dapat mendorong rasa kepemilikan terhadap proses pembelajaran, meningkatkan motivasi, dan menghasilkan lingkungan pendidikan yang lebih kooperatif terhadap kebutuhan mereka. Suryadi dan Budiansyah (2016) menegaskan bahwa keterlibatan siswa dalam dialog mengenai kebijakan pendidikan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih relevan terhadap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, menciptakan mekanisme yang memungkinkan siswa untuk berkontribusi dalam proses kebijakan pendidikan, seperti forum diskusi, survei siswa, atau perwakilan siswa dalam komite kebijakan sekolah, menjadi langkah penting dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berpusat pada siswa (Haryanto, 2018).

Kebijakan pendidikan nasional memiliki pengaruh langsung terhadap pengalaman belajar dan perkembangan akademik siswa SMA. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana siswa menyikapinya. Menurut penelitian Widodo (2018), sikap siswa SMA terhadap kebijakan pendidikan dapat bervariasi dari sangat mendukung hingga menolak, tergantung pada pemahaman mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana kebijakan itu memengaruhi kehidupan akademik mereka. Misalnya, kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menimbulkan beragam respons di kalangan siswa SMA. Studi yang dilakukan oleh Pratiwi (2020) menunjukkan bahwa siswa yang memahami esensi kebijakan ini cenderung memiliki sikap positif dan menunjukkan peningkatan motivasi belajar. Sebaliknya, siswa yang kurang memahami atau merasa tidak siap dengan perubahan yang dibawa oleh kebijakan tersebut cenderung menunjukkan sikap skeptis atau bahkan resistensi. Hal ini menegaskan pentingnya melibatkan perspektif siswa dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Suryadi dan Budimansyah (2019) menekankan bahwa sikap positif siswa terhadap kebijakan pendidikan dapat menjadi katalis untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses pembelajaran, yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, memahami dan mempertimbangkan sikap siswa SMA terhadap

kebijakan pendidikan menjadi aspek krusial dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan di tingkat menengah atas.

1.2 Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Sikap Siswa kelas XII SMAS Islam Athirah 1 Makassar terhadap Isu-isu Kebijakan Pendidikan Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Sikap Siswa kelas XII SMAS Islam Athirah Makassar Terhadap Isu-isu Kebijakan Pendidikan Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah menjelaskan tujuan penelitian, penting untuk mengetahui manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang terkait, terutama dalam memahami sikap siswa SMAS Islam Athirah Makassar terhadap kebijakan pendidikan nasional.

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan pendidikan dan psikologi pendidikan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang sikap siswa terhadap kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam konteks sekolah Islam Athirah Makassar.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pembuat Kebijakan:

- a) Memberikan wawasan berharga tentang perspektif siswa SMA Islam terhadap kebijakan pendidikan nasional.
- b) Membantu dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan siswa SMA, khususnya di sekolah Islam swasta.
- c) Menyediakan data empiris yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pendidikan nasional.

2) Bagi SMAS Islam Athirah Makassar:

- a) Membantu pihak sekolah dalam memahami sikap dan persepsi siswa mereka terhadap kebijakan pendidikan nasional.
- b) Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan program dan strategi pembelajaran yang lebih selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan siswa.

- c) Mendorong terciptanya dialog yang lebih terbuka antara pihak sekolah dan siswa mengenai isu-isu kebijakan pendidikan.
- 3) Bagi Pendidik:
- a) Meningkatkan pemahaman guru tentang sikap siswa terhadap kebijakan pendidikan, yang dapat membantu dalam mengadaptasi metode pengajaran.
 - b) Memberikan insight untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional.
- 4) Bagi Siswa:
- a) Memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan pendidikan yang mempengaruhi mereka secara langsung.
 - b) Meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses kebijakan pendidikan.
- 5) Bagi Peneliti Selanjutnya:
- a) Menyediakan data dan temuan yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang sikap siswa terhadap kebijakan pendidikan, terutama dalam konteks sekolah Islam maupun sekolah lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sejenis

- a. Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023).

Institusi pendidikan digunakan untuk membantu siswa mewujudkan potensi penuh mereka. Perubahan strategi persekolahan di Indonesia mengalami pasang surut oleh pertemuan-pertemuan tertentu. Pendidikan Indonesia perlu segera ditingkatkan jika ingin menghasilkan generasi-generasi individu yang tangguh yang mampu bersaing dengan bangsa lain dan tidak ketinggalan tren global. Salah satu tantangan yang dihadapi pendidikan saat ini ialah perubahan kebijakan ini. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah tentunya nantinya sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan. Suka atau tidak suka guru dan siswa, mereka harus bisa beradaptasi dengan kebijakan pendidikan yang baru. Kajian ini bertujuan untuk (1) mempelajari lebih dalam tentang isu-isu pendidikan di Indonesia; (2) Mempelajari perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan kajian pustaka. Konsekuensi dari ujian ialah perubahan strategi pelatihan yang menggantikan sepenuhnya niat bekerja pada sifat persekolahan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kesungguhan tinggi dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman globalisasi, tampaknya hasilnya harus belum terlihat dengan baik.

- b. Dampak Kebijakan Pendidikan Karakter Terhadap Perilaku Siswa di Sekolah. Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(1), 186–191. Suhara, S. P., Darmansah, T., Nasution, A. S., & Wardani, T. K. (2024).

Pendidikan karakter telah menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional sebagai upaya membentuk generasi yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan sikap toleransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, di mana data dikumpulkan dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pendidikan karakter memiliki dampak positif terhadap perilaku siswa, seperti meningkatkan disiplin, kejujuran, serta kemampuan bekerja sama. Namun, efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kualitas implementasi di sekolah, dukungan dari guru dan orang tua, serta lingkungan sekolah yang kondusif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan dalam mengoptimalkan program pendidikan karakter di sekolah.

- c. Persepsi peserta didik terhadap implementasi kurikulum merdeka pada siswa kelas XII di SMAN 93 Jakarta (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia). UPI Repository. Nurafifah, R. (2023).

Revolusi industri menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semua negara berlomba-lomba dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi yang akan datang. Dalam upaya tersebut, cara yang mendasar yaitu dengan memperbaiki sistem atau kurikulum pendidikan. Negara Indonesiasendiri telah beberapa kali perubahan kurikulum, yang terbaru adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan rancangan kurikulum pada akhir tahun 2022 dan saat ini sedang dalam masa implementasi. Maka dari itu penelitian terkait implementasi kurikulum ini sudah seharusnya dilakukan, terlebih lagi terhadap peserta didik yang secara langsung menggunakan kurikulum merdeka ini. Dengan ini dilakukan penelitian mengenai persepsi peserta didik terhadap implementasi kurikulum merdeka. Beberapa aspek kurikulum yang dinilai antara lain adalah (1) kebijakan, (2) pelaksanaan pembelajaran dan (3) hasil belajar. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis deskriptif. Populasi penelitian ini adalah 65 peserta didik sebagai responden. Ada pula tempat penelitian yang dipilih yaitu siswa kelas XII SMAN 93 Kota Jakarta. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa implementasi kurikulum merdeka di SMAN 93 Kota Jakarta pada aspek (1) kebijakan, (2) pelaksanaan pembelajaran dan (3) hasil belajar dapat dikategorikan “sudah baik” dikarenakan rata-rata responden menjawab setuju berdasarkan pernyataan kuesioner yang diajukan.

2.2 Definisi Sikap

Sikap merupakan konsep fundamental dalam psikologi sosial dan pendidikan yang memiliki berbagai definisi dari para ahli. Azwar (2013) mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Lebih lanjut, Azwar menjelaskan bahwa sikap adalah respon terhadap dorongan sosial yang telah terkondisikan. Dalam pandangannya, sikap terdiri dari tiga komponen utama: kognitif (pemikiran), afektif (perasaan), dan konatif (kecenderungan berperilaku).

Suharyat (2009) memperluas pemahaman tentang sikap dengan menekankan bahwa sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut Suharyat, sikap dapat dipelajari dan dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah terjadinya perubahan sikap pada seseorang. Ini menunjukkan sifat dinamis dari sikap, yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan informasi baru.

Sementara itu, menurut W. LaPierre (1934), sikap adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu yang diorganisasikan melalui pengalaman dan mempengaruhi respons seseorang terhadap semua situasi yang berkaitan dengan objek tersebut. Sikap dibentuk oleh berbagai pengalaman hidup dan dapat berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan, nilai-nilai, dan lingkungan sosial. Sikap memiliki tiga komponen utama, yaitu:

- a. Komponen Kognitif, yaitu persepsi, keyakinan, atau pengetahuan seseorang terhadap suatu objek.
- b. Komponen Afektif, yaitu perasaan atau emosi yang dimiliki individu terhadap objek tersebut, seperti suka, benci, senang, atau marah.

- c. Komponen Konatif (Tendensi Perilaku), yaitu kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek tersebut, baik secara positif maupun negatif.

Dalam konteks penelitian ini, sikap siswa merujuk pada pandangan, perasaan, serta kecenderungan perilaku siswa terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan nasional yang berlaku, seperti Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Program Indonesia Pintar, dan sebagainya. Sikap ini penting untuk dianalisis karena mencerminkan tingkat penerimaan, pemahaman, dan dampak kebijakan tersebut terhadap proses belajar siswa di tingkat satuan pendidikan.

2.3 Kebijakan Pendidikan Nasional

a. Pengertian Kebijakan Pendidikan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang ditetapkan oleh otoritas tertentu sebagai pedoman dalam bertindak atau menyelesaikan masalah. Menurut Dunn (2003), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh satu aktor atau sekelompok aktor untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan merupakan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan sistem pendidikan secara nasional.

Kebijakan pendidikan nasional adalah seperangkat aturan, pedoman, dan strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia (Tilaar, 2002).

Tujuan dari kebijakan pendidikan nasional antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia dan kompeten, serta menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan global melalui pendidikan yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman (UU No. 20 Tahun 2003).

b. Landasan Hukum Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Landasan hukum merupakan dasar yuridis yang menjadi pijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional. Beberapa landasan hukum utama antara lain:

- 1) UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Republik Indonesia, 1945).
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk tujuan, struktur pendidikan, kurikulum, pendanaan, serta peran pemerintah dan masyarakat (UU No. 20 Tahun 2003).
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 262/M/2022 memberikan pedoman penerapan Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran (Kemendikbudristek, 2022).

Landasan hukum ini menjadi acuan penting dalam menyusun kebijakan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

d. Jenis-Jenis Kebijakan Pendidikan Nasional Terkini

Beberapa kebijakan terkini yang berdampak langsung pada siswa antara lain:

1) Kebijakan Merdeka Belajar

Diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan otonomi lebih besar kepada sekolah dan siswa. Menurut Tohir (2019), kebijakan ini dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap proses pembelajaran, meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar.

2) Perubahan Sistem Ujian Nasional

Penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan secara lebih holistik. Widodo dan Permana (2020) menyatakan bahwa perubahan ini dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap evaluasi pembelajaran dan mengurangi kecemasan terkait ujian.

3) Kurikulum 2013 dan Revisi-Revisinya

Kurikulum ini menekankan pendekatan saintifik, pembelajaran aktif, dan penguatan karakter. Penelitian oleh Sulfemi (2018) menunjukkan bahwa revisi kurikulum ini dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap metode pembelajaran dan sistem penilaian.

4) Kebijakan Sekolah Lima Hari

Diberlakukannya lima hari sekolah dalam seminggu memengaruhi manajemen waktu siswa dan keseimbangan antara kegiatan akademik dan kehidupan pribadi. Prasetyo et al. (2020) mencatat bahwa kebijakan ini berdampak pada sikap siswa terhadap penggunaan waktu dan kebugaran mental.

5) Program Pendidikan Inklusif

Mengintegrasikan siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang setara. Wardani (2017) menyebutkan bahwa program ini membentuk sikap siswa terhadap keberagaman, empati, dan inklusi sosial.

6) Digitalisasi Pendidikan

Pemerintah mendorong integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar, termasuk pembelajaran daring. Mustofa et al. (2019) mengemukakan bahwa kebijakan ini mempengaruhi sikap siswa terhadap teknologi dan pembelajaran mandiri berbasis digital.

7) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Program ini menekankan pentingnya nilai moral, seperti kejujuran, kerja sama, dan tanggung jawab. Suriadi et al. (2021) menyatakan bahwa PPK membentuk sikap siswa terhadap etika dan perilaku sosial dalam konteks kehidupan sekolah dan masyarakat.

8) Tes Kompetensi Akademik (TKA)

TKA merupakan bagian dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang digunakan dalam penerimaan mahasiswa baru. Tes ini menilai kemampuan penalaran

akademik dan logika berpikir siswa. Selain sebagai seleksi masuk perguruan tinggi, TKA secara tidak langsung mempengaruhi sikap siswa terhadap kesiapan akademik dan pola belajar di SMA (Kemendikbudristek, 2023).

e. Dampak Kebijakan Pendidikan terhadap Siswa

Kebijakan pendidikan memberikan dampak langsung pada proses pembelajaran siswa.

Dampak positifnya mencakup:

- 1) Siswa menjadi lebih aktif dan mandiri berkat pembelajaran yang fleksibel (Kurikulum Merdeka).
- 2) Penilaian lebih adil melalui AN yang menekankan kompetensi dan karakter.
- 3) Akses pendidikan lebih inklusif melalui PIP.

Namun, tantangan juga muncul, seperti:

- 1) sekolah dan guru dalam melaksanakan kebijakan belum merata.
- 2) Sosialisasi yang terbatas membuat siswa kurang memahami maksud kebijakan.
- 3) Ketimpangan akses teknologi dalam digitalisasi pembelajaran.

f. Tinjauan Teoritis terhadap Respons Siswa terhadap Kebijakan

Sikap siswa terhadap kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- 1) Sosialisasi kebijakan yang efektif dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap perubahan.
- 2) Kesiapan guru dan sarana sekolah memengaruhi kenyamanan siswa dalam mengikuti kebijakan.
- 3) Lingkungan keluarga dan teman sebaya juga turut memengaruhi sikap siswa.

2.4 Siswa Sekolah Menengah Atas

Siswa menengah atas (SMA) adalah peserta didik yang menempuh jenjang pendidikan setelah menamatkan pendidikan menengah pertama (SMP) atau sederajat. Pada jenjang ini, siswa berada pada masa transisi dari masa remaja menuju dewasa muda yang penuh dengan dinamika perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan intelektual. Menurut Depdiknas (2008), siswa SMA diharapkan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil, sehingga dapat menghadapi tantangan zaman dan berperan aktif dalam masyarakat.

Pada masa SMA, siswa menghadapi berbagai tuntutan akademik sekaligus sosial, yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap kebijakan pendidikan yang berlaku. Menurut Santrock (2011), masa remaja adalah fase di mana individu mulai membentuk identitas diri dan sikap kritis terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik dan sikap siswa SMA dalam konteks kebijakan pendidikan nasional agar program dan kebijakan yang dibuat dapat lebih sesuai dan efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Robert Donmoyer (dalam Given, 2008), deskriptif kuantitatif adalah pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Dengan tujuan untuk mendapatkan data aktual tentang sikap siswa kelas XII terhadap isu-isu kebijakan pendidikan nasional.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMAS Islam Athirah Makassar yang berlokasi di Jl. Kajaolalido No.22, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan Juni dan November Tahun 2025.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas (SMA) Athirah 1 Makassar kelas XII Sekolah tersebut dipilih karena para siswanya telah mengalami berbagai implementasi kebijakan pendidikan nasional dari Kementerian Pendidikan. Kondisi ini menjadikan populasi penelitian sangat relevan dalam menilai sikap siswa terhadap isu-isu kebijakan pendidikan nasional.

Sampel penelitian diambil dari kelas XII, yaitu kelas XII.1 hingga XII.5. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *quota sampling*. Pada metode ini, populasi dibagi ke dalam beberapa sub kelompok berdasarkan kriteria yang relevan dalam hal ini perbedaan kelas sehingga masing-masing sub kelompok memiliki kuota tertentu yang proporsional dengan keberagaman populasi yang ada. Responden kemudian dipilih secara non-acak hingga setiap kuota terpenuhi. Dengan pendekatan ini, diharapkan sampel yang diperoleh dapat mencerminkan keberagaman karakteristik siswa serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai sikap mereka terhadap isu-isu kebijakan pendidikan nasional.

Meskipun tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih seperti pada metode *probability sampling*, *quota sampling* dipilih karena dianggap lebih praktis dan dapat memastikan keberagaman sikap dari kelompok-kelompok yang telah diidentifikasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu mencerminkan perbedaan pandangan di antara segmen-segmen siswa yang ada, sehingga analisis terhadap isu-isu kebijakan pendidikan nasional menjadi lebih mendalam dan komprehensif. Metode ini membantu peneliti dalam mendapatkan sampel yang seimbang dan proporsional, sehingga meskipun pengambilan sampel dilakukan secara non-acak, representativitas terhadap karakteristik penting dalam populasi tetap dapat terjaga.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner terbuka, yang disusun berdasarkan komponen sikap (kognitif, afektif, dan konatif).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan tahapan analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016), yang terdiri dari:

- a. Reduksi data: menyaring data-data penting dari hasil kuesioner.
- b. Penyajian data: menyusun hasil data dalam bentuk naratif, kutipan, atau tabel.
- c. Penarikan kesimpulan: menyimpulkan makna dan kecenderungan sikap siswa terhadap kebijakan pendidikan nasional.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner terbuka yang dikembangkan berdasarkan indikator sikap, yaitu:

- a. Komponen kognitif (pengetahuan siswa terhadap kebijakan).
- b. Komponen afektif (perasaan siswa terhadap kebijakan).
- c. Komponen konatif (kecenderungan perilaku siswa terhadap kebijakan)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap sepuluh orang perwakilan siswa dari kelas XII.1 hingga XII.5 di SMA Athirah 1 Makassar. Masing-masing responden dipilih menggunakan teknik quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, dalam hal ini yaitu kemampuan siswa untuk memberikan jawaban yang relevan dan informatif mengenai topik penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yakni:

- 1) Apa saja kebijakan pendidikan nasional yang kamu ketahui atau pernah kamu dengar sebutkan dan kalau bisa jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu.

Tabel 4.1 hasil pengelompokkan jawaban pertanyaan 1

No	Kebijakan Pendidikan Nasional yang Disebutkan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kurikulum Merdeka	9	90%
2	Kurikulum 2013 (K-13)	1	10%
3	Tes Kemampuan Akademik (TKA)	4	40%
4	Wajib Belajar 13 Tahun	1	10%
5	Sekolah/Pesantren Ramah Anak	1	10%

Sumber: Data hasil kuesioner penelitian (2025)

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pendidikan nasional yang paling banyak diketahui oleh siswa adalah Kurikulum Merdeka, disebut oleh 9 responden (90%). Para siswa berpendapat bahwa kurikulum ini memberi kebebasan bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, serta mendorong kreativitas melalui kegiatan berbasis proyek seperti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Sebanyak 4 responden (40%) juga mengenal Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai kebijakan pengganti Ujian Nasional yang berfungsi untuk validasi nilai rapor dalam jalur SNBP.

Selain itu, 1 responden (10%) menyebut Kurikulum 2013 (K-13) yang menekankan pengembangan karakter dan pembelajaran kontekstual, 1 responden (10%) menyebut program Wajib Belajar 13 Tahun, serta 1 responden (10%) menyebut Sekolah Ramah Anak, yang berfokus pada keamanan dan kenyamanan siswa dalam proses belajar.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa siswa paling mengenal Kurikulum Merdeka dan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang merupakan dua kebijakan utama dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini.

- 2) Dari kebijakan yang kamu ketahui, mana yang menurutmu paling berpengaruh terhadap kegiatan belajar di sekolah? Dan menurutmu apa alasannya?

Tabel 4.2 hasil pengelompokan jawaban pertanyaan 2

No	Kebijakan yang Dianggap Paling Berpengaruh	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kurikulum Merdeka	4	40%
2	Kurikulum (umum/tidak disebut spesifik)	2	20%
3	Kurikulum 2013 (K-13)	1	10%
4	Tes Kemampuan Akademik (TKA)	2	20%
5	Semua Kebijakan Pendidikan	1	10%

Sumber: Data hasil kuesioner penelitian (2025)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sepuluh responden, diperoleh data bahwa Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang paling berpengaruh terhadap kegiatan belajar di sekolah dengan persentase sebesar 40%. Mayoritas siswa menilai bahwa Kurikulum Merdeka membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel, menyenangkan, serta mendorong kreativitas dan kolaborasi. Mereka merasa kebijakan ini memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan proyek dan pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Selain itu, sebesar 20% responden menyebut bahwa Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga memiliki pengaruh yang besar, terutama bagi siswa kelas XII. Hal ini karena TKA menjadi syarat validasi rapor dan penentuan kelulusan atau seleksi masuk perguruan tinggi, sehingga memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Kemudian, 20% responden lainnya menyebut “kurikulum” secara umum sebagai faktor penting yang memengaruhi kegiatan belajar, karena seluruh aktivitas pembelajaran berlandaskan pada kebijakan tersebut.

Adapun sebagian kecil responden (10%) menyebut Kurikulum 2013 (K-13) sebagai kebijakan yang berpengaruh, terutama karena sistem penilaian dan pembelajaran yang masih digunakan pada beberapa mata pelajaran tertentu. Sementara itu, 10% responden lainnya menilai bahwa semua kebijakan pendidikan memiliki pengaruh yang sama karena setiap kebijakan membawa perubahan dan tantangan tersendiri bagi siswa.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa siswa paling merasakan dampak dari Kurikulum Merdeka dibanding kebijakan lainnya, terutama karena sifatnya yang inovatif dan menuntut partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Temuan ini juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi di kalangan siswa terhadap kebijakan pendidikan yang berlaku, tergantung pada pengalaman dan tingkat adaptasi mereka di lingkungan sekolah.

- 3) Bagaimana perasaan kamu terhadap penerapan kebijakan pendidikan nasional baru yang diterapkan di sekolah?

Tabel 4.3 hasil pengelompokan jawaban pertanyaan 3

No	Perasaan atau Pandangan Siswa terhadap Kebijakan Baru	Frekuensi	Persentase (%)
1	Positif / Mendukung	3	30%
2	Netral / Campuran (ada sisi positif dan negatif)	2	20%
3	Negatif / Tertekan atau Tidak Setuju	5	50%

Sumber: Data hasil kuesioner penelitian (2025)

Berdasarkan hasil tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 50% siswa, menunjukkan perasaan negatif atau merasa tertekan terhadap penerapan kebijakan pendidikan nasional yang baru seperti Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Siswa merasa kebijakan tersebut masih menimbulkan kebingungan, stres, dan tekanan tambahan dalam proses belajar. Beberapa responden juga menilai bahwa pelaksanaannya dilakukan secara tergesa-gesa tanpa penyesuaian yang cukup, sehingga belum sepenuhnya efektif di lingkungan sekolah.

Meskipun demikian, terdapat 30% responden yang menunjukkan pandangan positif terhadap kebijakan baru ini. Mereka menilai bahwa kebijakan seperti TKA dan P5 memiliki manfaat dalam mengembangkan karakter, kreativitas, serta mengukur kemampuan siswa secara lebih adil dan komprehensif dibandingkan ujian nasional sebelumnya. Responden dari kelompok ini cenderung melihat perubahan kebijakan sebagai upaya perbaikan sistem pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa di masa sekarang.

Sementara itu, 20% responden lainnya berada pada posisi netral atau campuran. Mereka menyadari adanya sisi positif dari kebijakan baru, seperti meningkatnya kesempatan untuk belajar secara kolaboratif dan berorientasi pada proyek, namun di sisi lain juga merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem yang terus berubah.

Secara umum, hasil ini menggambarkan bahwa penerapan kebijakan pendidikan baru di sekolah masih menimbulkan beragam respons dari siswa. Meskipun ada apresiasi terhadap tujuan positif dari kebijakan seperti Kurikulum Merdeka, TKA, dan P5, sebagian besar siswa masih membutuhkan waktu, pendampingan, dan penyesuaian agar dapat merasakan manfaatnya secara optimal.

- 4) Apakah kamu merasa kebijakan pendidikan nasional selama ini berpihak kepada siswa? Jelaskan mengapa kamu merasa demikian atau tidak.

Tabel 4.4 hasil pengelompokan jawaban pertanyaan 4

No	Kategori Persepsi Siswa	Frekuensi	Persentase (%)
1	Positif / Berpihak kepada siswa	4	40%
2	Netral / Campuran (ada sisi iya dan tidak)	5	50%
3	Negatif / Tidak berpihak kepada siswa	1	10%

Sumber: Data hasil kuesioner penelitian (2025)

Berdasarkan data di atas, mayoritas siswa (50%) menunjukkan sikap netral, yakni mengakui bahwa kebijakan pendidikan nasional memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya dinilai belum maksimal. Mereka merasa perubahan yang cepat dan sering menimbulkan kebingungan, baik bagi siswa maupun guru.

Sebanyak 40% siswa bersikap positif, menilai bahwa kebijakan seperti Kurikulum Merdeka memberikan ruang kebebasan belajar, memperhatikan minat dan bakat, serta meningkatkan kenyamanan dalam pembelajaran.

Namun, 10% siswa bersikap negatif karena merasa kebijakan masih terlalu membebani, kurang konsisten, dan membuat siswa seperti sedang menjadi objek percobaan sistem yang berubah-ubah.

- 5) Pernahkah kamu atau temanmu terlibat dalam menyuarakan pendapat tentang kebijakan pendidikan (misalnya lewat diskusi OSIS, media sosial, atau forum pelajar)? Ceritakan pengalamanmu.

Tabel 4.5 hasil pengelompokan jawaban pertanyaan 5

No	Bentuk Keterlibatan Siswa	Frekuensi	Persentase (%)
1	Aktif Menyuarakan Pendapat (langsung maupun tidak langsung)	7	70%
2	Tidak Pernah Terlibat / Pasif	3	30%

Sumber: Data hasil kuesioner penelitian (2025)

Berdasarkan tabel di atas data menunjukkan bahwa mayoritas siswa (70%) pernah terlibat dalam menyuarakan pendapat mengenai kebijakan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan 30% siswa tidak pernah terlibat.

- 6) Apa yang ingin kamu sampaikan kepada pemerintah jika kamu diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasi tentang pendidikan di Indonesia?

Tabel 4.6 hasil pengelompokan jawaban pertanyaan 6

No	Aspirasi / Harapan Siswa kepada Pemerintah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Konsistensi dan Stabilitas Kurikulum	3	30%
2	Kurikulum yang Fleksibel dan Menyesuaikan Kondisi Siswa	2	20%
3	Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	2	20%
4	Pertimbangan Kesiapan Siswa dan Sekolah Sebelum Kebijakan Diterapkan	2	20%
5	Kebijakan yang Berpihak pada Kebutuhan Nyata Siswa	1	10%

Sumber: Data hasil kuesioner penelitian (2025)

Berdasarkan hasil tabel, aspirasi siswa terhadap kebijakan pendidikan menunjukkan beberapa pola utama. Pertama, sebagian besar siswa menekankan pentingnya konsistensi kurikulum, karena perubahan yang terlalu sering dianggap mengganggu proses belajar dan membuat siswa maupun guru harus terus beradaptasi. Mereka menginginkan kebijakan yang stabil dan berkelanjutan agar pembelajaran lebih efektif.

Sebagian siswa juga berharap kurikulum dapat lebih fleksibel, menyesuaikan kondisi dan kemampuan sekolah yang berbeda-beda. Selain itu, terdapat aspirasi agar pemerintah memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan, terutama di daerah yang fasilitas dan tenaga pendidiknya masih terbatas.

Siswa juga menyoroti perlunya pemerintah mempertimbangkan kesiapan sekolah dan peserta didik sebelum menerapkan kebijakan baru, karena mereka merasa sering menjadi pihak yang paling terdampak saat perubahan dilakukan secara tergesa-gesa. Sebagian kecil siswa menyarankan agar pemerintah lebih mendengar langsung suara siswa melalui dialog atau observasi lapangan.

Secara keseluruhan, siswa menginginkan pendidikan yang stabil, adil, relevan, dan manusiawi, serta mendukung perkembangan belajar secara optimal.

4.2 Pembahasan

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner terbuka yang disusun berdasarkan tiga komponen utama pembentuk sikap menurut Azwar (2013), yakni komponen kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan/sikap), dan konatif (tindakan). Berikut ini pemaparan hasil berdasarkan masing-masing komponen:

a. Komponen Kognitif (Pengetahuan tentang Kebijakan Pendidikan)

Sebagian besar responden menyebutkan kebijakan seperti Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013 (K-13), Program Wajib Belajar 13 Tahun, Tes Kompetensi Akademik (TKA), dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Kurikulum Merdeka disebut sebagai kebijakan yang memungkinkan siswa memilih mata pelajaran sesuai minat, sementara K-13 dianggap menekankan

pembentukan karakter, sikap, dan kontekstualisasi pembelajaran, dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang digunakan sebagai validasi nilai rapor dan sebagai acuan masuk jalur undangan. Mayoritas responden menganggap kurikulum sebagai kebijakan yang paling berpengaruh terhadap kegiatan belajar karena mengatur materi, metode, dan pendekatan guru dalam mengajar. Salah satu siswa menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka membuat pembelajaran lebih bebas dan sesuai kebutuhan siswa, sedangkan yang lain merasa kurikulum ini mengasah kreativitas meskipun juga menantang secara akademik.

b. Komponen Afektif (Perasaan terhadap Kebijakan Pendidikan)

Responden menunjukkan perasaan yang beragam terhadap kebijakan baru seperti TKA dan P5. Beberapa siswa merasa antusias dan tertantang, karena kebijakan tersebut memberi ruang untuk kolaborasi dan pengembangan karakter. Namun, ada pula yang merasa bingung dan lelah, terutama karena kebijakan sering berubah-ubah, sehingga siswa sulit beradaptasi dengan baik.

Sebagian besar siswa merasa kebijakan pendidikan nasional cenderung berpihak kepada siswa, terutama karena kebijakan terbaru berusaha menyesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Namun, ada juga yang mengkritisi kurangnya konsistensi kebijakan, yang menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan dalam proses belajar.

c. Komponen Konatif (Tindakan terhadap Kebijakan Pendidikan)

Beberapa siswa mengaku pernah menyuarakan pendapat melalui forum resmi seperti Forum Anak Kota Makassar, diskusi guru-siswa, atau media sosial. Namun, sebagian lainnya menyampaikan pendapat secara informal di lingkungan teman sebaya tanpa menyalurkan secara formal.

Jika diberi kesempatan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, para siswa menyuarakan harapan agar kebijakan pendidikan lebih konsisten, tidak sering berubah, dan lebih merata dalam penerapannya. Mereka juga menginginkan pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, melainkan juga mendorong pengembangan karakter dan kreativitas.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa siswa memiliki pemahaman dasar mengenai kebijakan pendidikan nasional, terutama kebijakan yang langsung mereka alami seperti Kurikulum Merdeka dan K-13. Ini menguatkan pendapat Azwar (2013) bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek dibentuk oleh tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif, yang bekerja secara terpadu dalam membentuk persepsi.

Respons positif terhadap Kurikulum Merdeka dan P5 menunjukkan bahwa siswa mengapresiasi pendekatan yang lebih fleksibel dan humanis dalam pembelajaran. Namun, kebingungan akibat seringnya perubahan kebijakan menunjukkan adanya kebutuhan akan konsistensi kebijakan, sebagaimana diungkap oleh Tilaar & Nugroho (2016) bahwa kebijakan yang tidak konsisten dapat menimbulkan resistensi, termasuk dari peserta didik.

Pada aspek konatif, keterlibatan siswa dalam menyuarakan aspirasi menandakan bahwa siswa bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif yang mampu berkontribusi terhadap perbaikan sistem pendidikan. Hal ini senada dengan temuan Wibowo (2019) yang menyebutkan bahwa partisipasi siswa dalam kebijakan pendidikan dapat menjadi sarana pembentukan karakter, demokrasi, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sepuluh orang siswa kelas XII di SMA Athirah 1 Makassar mengenai persepsi mereka terhadap kebijakan pendidikan nasional, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengetahuan siswa terhadap kebijakan pendidikan nasional cukup beragam, dengan dominasi pada pemahaman mengenai Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013, serta program-program seperti TKA dan P5. Hal ini menunjukkan bahwa siswa secara umum mengikuti perkembangan kebijakan yang diterapkan di sekolah mereka. Pengetahuan ini menjadi indikator awal bahwa siswa mampu menyerap informasi kebijakan yang berdampak langsung pada proses belajar mereka (Moleong, 2017).
- b. Sikap atau perasaan siswa terhadap kebijakan pendidikan nasional cenderung positif, terutama terhadap kebijakan yang memberi ruang bagi kreativitas, kolaborasi, dan pengembangan karakter. Meski demikian, terdapat pula kegelisahan karena kebijakan yang dianggap sering berubah. Seperti dikemukakan oleh Suyanto (2019), perubahan kebijakan yang terlalu cepat dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pelajar.
- c. Tindakan siswa terhadap kebijakan pendidikan masih bersifat individual, seperti menyuarakan pendapat melalui media sosial atau diskusi dengan guru. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi siswa belum terfasilitasi secara sistematis, meskipun ada potensi keterlibatan aktif jika diberikan ruang yang tepat. Pendapat ini sejalan dengan Wibowo (2019) yang menyebutkan bahwa pelibatan siswa dalam proses kebijakan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam pendidikan.

5.2 Saran

- a. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu:
- b. Bagi pihak sekolah, disarankan untuk memberikan ruang diskusi yang lebih terbuka dan terstruktur kepada siswa agar mereka dapat menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pendidikan. Forum OSIS, kelas diskusi, maupun survei internal bisa menjadi sarana pelibatan siswa secara aktif
- c. Bagi pemerintah, perlu adanya konsistensi dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pendidikan agar siswa tidak mengalami kebingungan dalam proses belajar. Konsistensi ini tidak berarti menolak perubahan, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan yang baru disosialisasikan dengan matang dan diberi masa transisi yang cukup.
- d. Bagi siswa, diharapkan untuk terus aktif mencari informasi dan menyuarakan pendapat secara konstruktif, baik melalui media sosial, forum pelajar, maupun melalui komunikasi dengan guru.

Keterlibatan ini dapat menjadi bentuk partisipasi dalam pembangunan pendidikan yang lebih baik dan demokratis.

- e. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas jumlah responden dan menggunakan teknik pengumpulan data lain seperti wawancara mendalam agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai persepsi siswa terhadap kebijakan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2013). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. (2008). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction* (3rd ed.). Pearson Education.
- Haryanto, H. (2018). Peran aktif siswa dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(1), 71–81.
- Kemendikbud. (2021). *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbudristek. (2023). *Panduan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.
- LaPierre, R. T. (1934). Attitudes vs. actions. *Social Forces*, 13(2), 230–237.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, M., Haryono, A., & Sari, D. P. (2019). Pengaruh digitalisasi pembelajaran terhadap minat belajar siswa di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 2(2), 45–52.
- Nurafifah, R. (2023). *Persepsi peserta didik terhadap implementasi kurikulum merdeka pada siswa kelas XII di SMAN 93 Jakarta* (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia). UPI Repository.
- Novitasari, A. (2020). *Hubungan pengetahuan dengan sikap siswa tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Prasetyo, A., Rukmana, E., & Herlina, S. (2020). Pengaruh kebijakan lima hari sekolah terhadap keseimbangan kehidupan belajar siswa. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6(1), 33–41.
- Pratiwi, S. (2020). Respon siswa SMA terhadap kebijakan Merdeka Belajar: Studi kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 27(1), 45–57.
- Santrock, J. W. (2011). *Adolescence* (14th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhara, S. P., Darmansah, T., Nasution, A. S., & Wardani, T. K. (2024). Dampak kebijakan pendidikan karakter terhadap perilaku siswa di sekolah. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 186–191.
- Suharyat, Y. (2009). Hubungan antara sikap, minat dan perilaku manusia. *Jurnal Region*, 1(3), 1–19.

- Sulfemi, W. B. (2018). Dampak implementasi Kurikulum 2013 terhadap motivasi belajar dan sikap siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(3), 112–119.
- Suriadi, R., Nugraha, H., & Yulianti, L. (2021). Penguatan pendidikan karakter dalam membentuk perilaku sosial siswa sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 183–192.
- Suryadi, A., & Budimansyah, D. (2016). Advance school leadership, progress teaching approach and boost learning: The case of Indonesia. *The New Educational Review*, 45(3), 76–86.
- Suryadi, A., & Budimansyah, D. (2019). Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan Siswa dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2016). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809.
- Tohir, M. (2019). Merdeka belajar: Potensi aplikasi membentuk karakter. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, 4(1), 17–29.
- Tohir, M. (2019). Merdeka belajar sebagai transformasi pendidikan nasional. *Buletin Pendidikan Indonesia*, 1(1), 1–5.
- Wardani, E. K. (2017). Sikap siswa terhadap program pendidikan inklusif di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 14(1), 72–78.
- Widodo, A. (2018). Analisis kebijakan pendidikan di Indonesia: Dampak dan tantangan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(2), 91–102.
- Widodo, A., & Permana, D. (2020). Dampak penghapusan ujian nasional terhadap psikologis siswa: Studi terhadap asesmen kompetensi minimum. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(2), 95–104.
- Wibowo, A. P. (2019). Partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan di sekolah sebagai praktik pendidikan untuk membangun karakter. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282–291.
- Yonatan, A. Z. (2025, 23 Mei). *Di Balik Kebijakan Pendidikan Pemerintah Indonesia*. GoodStats. Diakses 6 November 2025 dari <https://goodstats.id/article/dibalik-kebijakan-pendidikan-pemerintah-indonesia-vtQs>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan

1. Apa saja kebijakan pendidikan nasional yang kamu ketahui atau pernah kamu dengar? Sebutkan dan kalau bisa jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu.
2. Dari kebijakan yang kamu ketahui, mana yang menurutmu paling berpengaruh terhadap kegiatan belajar di sekolah? dan menurutmu apa alasannya.
3. Bagaimana perasaan kamu terhadap penerapan kebijakan pendidikan nasional yang baru diterapkan di sekolah? dan menurutmu apa alasannya.
4. Bagaimana perasaan kamu terhadap penerapan kebijakan pendidikan nasional baru yang diterapkan di sekolah?
5. Apakah kamu merasa kebijakan pendidikan nasional selama ini berpihak kepada siswa? Jelaskan mengapa kamu merasa demikian atau tidak.
6. Pernahkah kamu atau temanmu terlibat dalam menyuarakan pendapat tentang kebijakan pendidikan (misalnya lewat diskusi OSIS, media sosial, atau forum pelajar)? Ceritakan pengalamanmu

Lampiran 2: Daftar informan

1. Kelas XII.1: F, K
2. Kelas XII.2: R, A
3. Kelas XII.3: F, A
4. Kelas XII.4: Z, B
5. Kelas XII.5: A, N

Lampiran 3: Bukti jawaban Google form

1. Pertanyaan 1:

Apa saja kebijakan pendidikan nasional yang kamu ketahui atau pernah kamu dengar? Sebutkan dan kalau bisa jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu.

10 responses

Kurikulum Merdeka: kasih kebebasan ke sekolah dan guru buat ngatur cara belajar sesuai kebutuhan siswa.

Program P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) : kegiatan proyek yang bantu siswa biar lebih kenal nilai-nilai Pancasila, belajar kerja sama, dan peduli sama lingkungan sekitar.

1. TKA (Tes kemampuan akademik) : sebagai pengganti un untuk validasi nilai rapor selama 2 tahun lebih untuk mendaftar jalan undangan.

2. kurikulum merdeka: Kebijakan terbaru dari Kemendikbudristek yang memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik

kurikulum merdeka, bbrp tahun terakhir kurikulum merdeka jdi kebijakan pendidikan nasional, kurikulumnya ini mencakup kebebasan belajar sesuai minat dan kemampuan pada siswa(i)

Wajib sekolah 13 tahun : satunya tk kita wajib sd smp sma

Kurikulum Merdeka : tidak lagi ipa ips tapi memilih langsung mapilnya

Pesantren & Sekolah Ramah Anak : yang memprioritaskan hak anak dan bikin sekolah aman & nyaman

Kurikulum merdeka, TKA

Kurikulum merdeka yang akan diganti lagi kurikulumnya.

kurikulum merdeka, kurikulum ini kebanyakan menurutku mengasah kreativitas siswa dan lebih banyak projek

Tes Kemampuan Akademik (TKA) katanya untuk menyelaraskan pendidikan di indonesia sekaligus validasi nilai raport bagi siswa kelas 12 yang ingin mendaftaf SNBP

kurikulum merdeka

Kebijakan nasional K-13.

K-13 merupakan kurikulum pendidikan yang dirancang untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, kontekstual, dan berfokus pada pengembangan karakter siswa. Jadi, selain mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, K-13 juga menekankan sikap seperti disiplin, jujur, dan kerja sama.

2. Pertanyaan 2:

Dari kebijakan yang kamu ketahui, mana yang menurutmu paling berpengaruh terhadap kegiatan belajar di sekolah? dan menurutmu apa alasannya.

10 responses

Menurut saya, Kurikulum Merdeka paling berpengaruh. Karena lebih banyak proyek dan kegiatan yang bikin kita lebih kreatif dan bisa kerjasama sama teman-teman. Jadinya, kita lebih aktif dalam pembelajaran.

1. Tka: menurut saya sebagai seorang siswa yang berawal syarat untuk mendapatkan snbp hanya nilai rapor tiba" menjadi tka sangat tidak fair dimana kita sudah berusaha dari kelas satu agar fokus untuk meningkatkan grafik nilai smdan

kurikulum sih, karena kurikulum itu menjadi pakar utama bagaimana sekolah akan mengarahkan dan mengembangkan karakter dan cara belajar siswa(i) sehingga mencapai tujuan yang disiapkan

Kurikulum karna itu yang dipelajari dan kita hadapi serta ikuti.

semuanya sangat berpengaruh karena kebijakan tersebut berbeda dari kebijakan sebelum nya dan menjadi tantangan baru bagi setiap siswa

kurikulum merdeka. banyak sekali siswa dan siswi saat ini mengenali potensinya sendiri namun banyak juga murid yang menurun terkait intelektualnya.

Menurutku, Kurikulum Merdeka paling berpengaruh karena langsung ngaruh ke cara guru ngajar dan murid belajar. Belajarnya jadi lebih bebas, seru, dan sesuai kebutuhan murid.

TKA, karna sekolah membuat siswa kelas 12 untuk intensif TKA sehingga jadwal pbm pasti berubah ubah, karna mengikuti dari kebijakan pendidikan pemerintah, dan tekanan akademik juga pasti bertambah

menurut saya, kurikulum merdeka karena membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel, menekankan pada proyek, kreativitas, serta karakter siswa

Menurut saya K-13 merupakan salah satu kebijakan yang paling berpengaruh karena kurikulum tersebut mengatur pelajaran apa yang dipelajari, cara belajar, dan cara nilai. Jadi kegiatan belajar di kelas sangat dipengaruhi oleh kurikulum.

3. Pertanyaan 3:

Bagaimana perasaan kamu terhadap penerapan kebijakan pendidikan nasional baru yang diterapkan di sekolah (TKA, P5, dll)?

10 responses

menurut saya TKA kurang efektif karna pelaksanaannya tiba-tiba jadi banyak siswa yg tidak belajar secara maksimal. untuk P5 buat kita belajar lewat proyek yang lebih nyata dan bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Cuma kadang jadwalnya agak padat, jadi butuh penyesuaian.

Menurutku, penerapan kebijakan pendidikan nasional yang baru seperti TKA dan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) terasa menantang. Di satu sisi, memang butuh penyesuaian karena cara belajar dan penilaiannya berbeda dari sebelumnya. Tapi di sisi lain, saya merasa kebijakan ini mendorong siswa jadi lebih aktif, kreatif, dan berpikir kritis. Kita jadi tidak hanya belajar untuk nilai, tapi juga untuk memahami dan mengembangkan diri. Jadi, meskipun awalnya agak sulit, menurutku kebijakan ini membawa perubahan positif bagi pendidikan di Indonesia.

untuk penerapan TKA sendiri, menurut ku terlalu buru-buru, dan ini idenya buruk sekali, karena jatohnya kita murid yang sudah kasih bagus nilai untuk rapor jadi merasa sia sia karena chance untuk lulus snbp tergantung TKA itu sendiri yang menjadi penentu nilai, memang TKA kata pemerintah tidak wajib, tp knp dijadikan penentu kelulusan

bingung apalagi berubah ubahh

cukup menantang

Saya sebenarnya sedikit legal dengan adanya TKA walaupun akan memakan dan menguras tenaga tapi dengan TKA kita bisa mengukur potensi kita secara fair.

Kebijakan baru seperti TKA dan P5 cukup baik karena bikin belajar lebih fokus ke kemampuan dan karakter. Tapi, butuh waktu dan persiapan biar bisa diterapkan dengan maksimal.

capek, lelah, pusing, kondisi badan tidak fit, gampang sakit, tekanan akademik yang hebat

pusing, stress

Perasaanku terhadap penerapan kebijakan pendidikan nasional baru seperti TKA dan P5 ini cukup seru. Sekolah tidak hanya mengajarkan pelajaran biasa, tapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti kerja sama karena P5 memiliki kegiatan yang cukup banyak dan membutuhkan kerja sama tim yang kuat dalam diri pelajar, supaya siswa tidak hanya pintar, tapi juga punya sikap baik dan jadi orang yang bermanfaat buat orang lain.

4. Pertanyaan 4:

Apakah kamu merasa kebijakan pendidikan nasional selama ini berpihak kepada siswa? Jelaskan mengapa kamu merasa demikian atau tidak.

10 responses

Menurut saya cukup berpihak, terutama dengan adanya Kurikulum Merdeka yang lebih memberi ruang buat kita berkembang sesuai minat. Tapi memang masih ada kekurangan, seperti kadang guru belum siap dengan perubahan pelaksanaannya yg belum maksimal

menurut saya ada beberapa yang iya dan beberapa yang tidak, karena banyak dari kebijakan membuat siswa merasa terlalu banyak kebijakan yg membuat pembelajaran tidak efektif

selama yang ku tau, tentu akan mutlak berpihak kepada siswa, tapi pemerintahan juga tentunya masih cari cari kebijakan pendidikan yang sekiranya pas utk siswa(i), yes berpihak pada siswa

pemerintah sebenarnya selalu memperhatikan kita, tapi mungkin dengan banyaknya ide yang berubah ubah membuat kita bingung

ya karena mendukung minat dan bakat siswa

Ini tergantung dengan bagaimana kita memandang kebijakan pendidikan Nasional itu. Contoh jika murid itu menikmati akan adanya kurikulum merdeka, mereka akan menganggap bahwa kebijakan pendidikan itu akan berpihak pada siswa. Begitu pula dengan sebaliknya

Ya, kebijakan pendidikan sekarang mulai berpihak ke siswa karena lebih fokus ke minat, kemampuan, dan pengembangan karakter. Tapi, masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya.

tentu tidak, dari tahun ketahun angkatan ku selalu jadi kelinci percobaan, mulai dari sekolah dengan sistem daring, kurikulum merdeka dengan banyaknya tugas projek dan praktek, serta TKA yang info nya dadakan dengan berharap bahwa perjuangan 2,5 tahun divalidasi oleh nilai 2 hari, semua kebijakan itu memaksa dan menuntut kami untuk beradaptasi dengan cepat, tentu tidak berpihak kepada siswa

beberapa iya terutama karena tujuannya adalah membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna , namun ada juga kebijakan yang tidak berpihak kepada siswa

Tentu. Karena kebijakan pendidikan nasional dirancang untuk kenyamanan pembelajaran pelajar di Sekolah.

5. Pertanyaan 5:

Pernahkah kamu atau temanmu terlibat dalam menyuarakan pendapat tentang kebijakan pendidikan (misalnya lewat diskusi OSIS, media sosial, atau forum pelajar)? Ceritakan pengalamanmu.

10 responses

kami sempat diskusi soal kebijakan pendidikan dalam rapat OSIS dan juga di media sosial. Kami bahas soal beban tugas di P5 yang kadang terasa banyak banget.

iyaa, kita sebagai pelajar tentunya sering menyuarakan mulai dari media sosial hingga forum pelajar dimana kita mengeluarkan keluhan dan salah satu contoh: petisi tka yang sempat populer kemarin

temanku tanda tangan petisi TKA

iyaa pernahh dalam audiensi di forum anak makassar bersama bapak&ibu

tidak

Dari saya sendiri melalui media sosial. saya menyuarakan terkait dengan ketidakmampuan murid SMA dalam literasi dan numerasi.

kalo saya sendiri tidak pernah berdiskusi melalui forum ya paling lebih banyak protes sama teman temanku dengan banyaknya projek di kurikulum sekarang.

kalo saya sendiri tidak pernah berdiskusi melalui forum ya paling lebih banyak protes sama teman temanku dengan banyaknya projek di kurikulum sekarang.

pernah dalam merepost postingan yang mendukung aspirasi siswa dalam kebijakan pemerintah di story instagram

Tidak

Pernah saat berdiskusi dengan guru, saya dan teman-teman membahas mengenai tugas yang terlalu banyak. Kami usul ke guru supaya tugas proyek bisa dikasih waktu lebih lama. Syukurnya, guru-guru mendengarkan dan mulai menyesuaikan waktu tugas.

6. Pertanyaan 6

Apa yang ingin kamu sampaikan kepada pemerintah jika kamu diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasi tentang pendidikan di Indonesia?

10 responses

lebih memperhatikan kesiapan siswa/siswi, sekolah dan guru sebelum kebijakan baru diterapkan

Untuk pemerintah kedepannya, saya sebagai seorang siswa berharap ketika membuat kebijakan kedepannya bisa lebih dipertimbangkan dan langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi siswa yang akan diberikan kebijakan saya harap pemerintah dapat mendukung full siswa dengan cara memudahkan, meluncurkan, siswa dalam menghadapi pembelajaran disekolah maupun tingkat lanjut

masalah pendidikan itu dipikirkan secara matang, tidak harus ganti pemerintahan ganti kebijakan

saya berharap pemerintah lebih konsisten lagi

semoga bisa membuat kebijakan yang lebih baik

jika sudah menetapkan satu kurikulum, cukup kurikulum itu saja yang dikembangkan dan di dalam. Saat ini, gonta-ganti kurikulum sudah seperti hal lumrah bagi pemerintah, namun ini membuat ketimpangan bagi siswa dan siswi

saya ingin pemerintah buat pendidikan lebih merata, gampang diakses semua anak, dan fokus ke

saya ingin pemerintah buat pendidikan lebih merata, gampang diakses semua anak, dan fokus ke pengembangan kreativitas, bukan cuma nilai.

jangan jadikan ki angkatan coba coba kodong yang selalu dipaksa beradaptasi dengan kebijakan yang selalu terus menerus berubah, kalau mau mengubah kebijakan pendidikan, biarlah angkatan yang paling bawah itu yang menjadi percobaannya, karna masih awal dan masih banyak persiapan nya dalam beradaptasi, jangan dikasih sama angkatan yang sudah mau lulus.

Saya ingin pemerintah lebih memperhatikan sekolah di daerah dan terus meningkatkan kualitas guru agar pendidikan makin merata

Kami hanya menginginkan kurikulum dapat disesuaikan sesuai dengan zaman sekarang.